**DAMPAK PERANG DUNIA II TERHADAP PERGOLAKAN IDEOLOGI POLITIK DAN EKONOMI DI ERA INDUSTRIALISASI 4.0**

**Ragil Kasuda1), Rahmat Banu Widodo2)**

1 *Universitas Paramadina* 2 *Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa Bekasi*

Email:

[Kusada.ragil@gmail.com](mailto:Kusada.ragil@gmail.com) [rahmatbanuwidodo@stai-attaqwa.ac.id](mailto:rahmatbanuwidodo@stai-attaqwa.ac.id)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak Perang Dunia II terhadap Pergolakan Ideologi Politik dan Ekonomi di Era Industrialisasi 4.0 yang digunakan sebagai studi kritis melalui pendekatan sosio-historis dan kualitatif deskriptif. Dengan harapan tulisan ini dapat menjelaskan secara deskriptif-analisis didukung dengan kajian pustaka yang diperoleh serta penjelasan secara empiris dan teoritis. Adapun teori yang digunakan pada tulisan ini adalah teori ruang publik (*Public Sphere*) yang dikemukan oleh Jurgen Habermas, teori Elit yang dikemukan oleh Gaetano Mosca dan Vilfredo Pareto dan teori Oligarki yang dipopulerkan oleh Jeffrey Winters. Pandangan-pandangan lain mengenai ekonomi-politik diambil dari pelbagai kutipan buku dan jurnal karangan Vedi Hadiz. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik adalah dampak besar dan mengakar bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Selain itu, penghayatan atas agama dan pemahaman ideologi yang hanya segelitir orang memahaminya menjadi dampak Perang Dunia II yang berdampak pada ketimpangan intelektual bagi masyarakat. Sehingga apapun yang diperoleh pada sosial media menjadi asupan primer dalam kognitif tiap-tiap penggunanya.

**Kata Kunci**

*World War II, Political Ideology, Populism and Industrialization.*

**Pendahuluan**

Perang dunia kedua mempunyai peran penting dalam kehidupan umat manusia secara berkepanjangan. Tentunya juga dengan pelbagai pemikiran masing-masing tokoh bangsa dan pemimpin-pemimpin Negara.

Kekalahan Fasisme yang ditandai oleh dijatuhkannya bom atom di Kota Hiroshima dan Nagasaki menjadi catatan sejarah yang membekas bagi masyarakat Jepang pada masa itu hingga sekarang. Tidak hanya itu, perang dunia kedua juga memberikan beragam pembelajaran bagi Negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat agar senantiasa merapatkan kembali barisannya dengan sekutu guna memperkuat pakta pertahanannya untuk keamanan Negara-negara di dalamnya. Dampak-dampak yang terjadi tidak hanya berakibat terhadap keamanan dan pertahanan sebuah Negara, melainkan juga ideologi politik dan ekonomi sebagai paradigma awal untuk kemudian melahirkan sebuah sistem ketatanegaraan.

Sehingga umumnya Negara-negara yang menjadi bagian daripada kelompok sekutu, tentunya menganut ideologi liberalisme dan kapitalisme dalam mengatur laju pemerintahan dan perekonomian di dalamnya. Kemudian Negara-negara pasca perang dunia kedua yang menganut sistem komunisme, dikarenakan perkembangan zaman; mulai tergerus sedikit demi sedikit hingga sistem yang dianut adalah sistem kapitalis-sosialisme, dengan harapan sistem pemerintahan dan perekonomian akan berjalan beriringan bersama ideologi Negara. Perkembangan ideologi politik dan ekonomi tidak hanya terjadi pada Negara-negara barat dan timur, tetapi juga masuk pada wilayah Asia Tenggara; seperti Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand dan Indonesia—sejarah mencatat Vietnam pernah menjadi daerah yang direbutkan oleh dua kutub ideologis yakni liberalis-kapitalis dan sosialis-komunis. Vietnam Selatan dikuasai oleh para kaum liberal dan Vietnam Utara dikuasai oleh kaum komunis.

Kaum liberalis yang dikomandoi oleh Amerika Serikat mengalami kekalahan, karena kecerdikan para kaum komunis di Vietnam Utara. Hal itu membuat setiap dunia mengetahui bahwa sekutu pun mempunyai kelemahan dalam mengatasi kaum Komunisme. Kekalahan Fasisme atas Liberalisme pada Perang Dunia II memberi pembelajaran bagi Komunisme untuk mengatasi pendekatan militer kaum liberal. Komunisme menjadi sebuah ideologi yang cukup diminati oleh Negara-negara di benua Asia, seperti Tiongkok, Vietnam, Korea Utara dan Laos; sulit akan dijumpai Negara-negara Eropa yang menganut paham komunisme.

Namun sejarah pun mencatat, komunisme pernah mengalami kekalahan terbesar dalam sejarah kehidupan umat manusia, yakni runtuhnya Uni Soviet melalui pergolakan politik internal dan kebijakan Glasnost dan Perestroika yang diterapkan oleh Mikail Gorbachev. Setiap Negara-negara bagian pun mulai terpecah menjadi 15 negara yang diantaranya mulai terpengaruh oleh paham liberalisme, seperti Ukraina. Ideologi liberalisme dan kapitalisme bekerja secara substansial pada ruang kehidupan manusia, tidak bereksistensi sebagai sebuah simbol—namun bereaksi terhadap sistem perekonomian yang berhilir pada kebutuhan dasar umat manusia; sandang, pangan dan papan. Kemenangan Sekutu atas Fasisme yang ditandai dengan Perjanjian Postdam di Jerman pada 1 Agustus 1945 yang disepakati oleh Perdana Menteri Clement Richard Atlee (Inggris), Sekretarus Joseph Stalin (Uni Soviet) dan Presiden Harry S. Truman (Amerika Serikat) bertujuan untuk melakukan demiliterisasi kekuatan Fasisme di Jerman.

Sejak saat itu, Fasisme dianggap sebagai penjahat perang karena menggunakan propaganda sebagai alat untuk menerapkan sistem totaliterianisme; sebagai sebuah ciri yang menonjol adalah penggunaan cara kekuasaan dan kekerasan pada semua bentuk hubungan masyarakat, entah itu hubungan politik atau tidak yang berbeda dengan otoriter. Dalam otoriter penggunaan kediktatoran bisa jadi hanya dalam pemerintahan saja. Sedangkan dalam totaliter ada usaha mencampuri dan mempengaruhi semua unsur dan komponen dalam masyarakat (Hasan, 2011). Berakhirnya PDII, selain merupakan kemenangan bagi Sekutu, juga memperlihatkan kemunduran kekuatan colonial lama. Bahkan kekuatan kolonial yang berasal dari Sekutu sekali pun tidak mampu menahan perubahan akibat perang di daerah koloni mereka di Asia (maupun Afrika). Seperti dialami Inggris dan Belanda, yang pada akhirnya mengakui defacto keberadaan RI karena harus berhadap-hadapan sebagai mitra perundingan yang setara (Nusferadi, 2008).

Era *Neo-Imprealisme* pun dimulai dengan berdirinya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada 24 Oktober 1945, bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia; markas besar PBB terletak di New York, Amerika Serikat. Penulis menyepakati apa yang disebut oleh Ir. Soekarno bahwa PBB adalah manifestasi neo-Imprealisme. Ir Soekarno mengutamakan pentingnya nasionalisme dalam memandang institusi internasional, seperti PBB. Dalam pidato tersebut, Ir. Soekarno mengungkapkan:

“Diantara asas-asas terdapat hak-hak bagi bangsa-bangsa untuk memilih bentuk pemerintahan sendiri-sendiri, kerja sama antarbangsa di dalam lapang ekonomi, jaminan sosial dan suatu perdamakan yang akan memberi jaminan kepada semua orang di semua negara untuk dapat hidup dengan bebas” (Supratman, 2022).

Selama periode Perang dunia II, umat manusia untuk pertama kalinya telah menghadapi kemungkinan pemusnahan total dan telah mengalami cukup banyak perang dan genoside sungguhan, namun dasawarsa-dasawarsa itu juga merupakan era paling dalam sejarah manusia—dengan perbedaan sangat signifikan. Hal ini mengejutkan sebab dasawarsa-dasawarsa itu mengalami banyak perubahan ekonomi, sosial dan politik pada era sebelumnya (Harari, 2017). Pada Abad ke-19 dan Abad ke-20 menjadi bukti sejarah dengan serangkaian peperangan dan revolusi di pelbagai Negara. Sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya bahwa Liberalisme dan Kapitalisme adalah produk yang mampu menjema pada bentuk sistem apapun, termasuk Komunisme. Perang Dunia I menghancurkan beragam bentuk kerajaan-kerajaan yang ada dunia; semua bentuk monarki absolut dan kemudian melahirkan ideologi liberalisme yang diadopsi sebagai sebuah sistem.

Pada Perang Dunia II, bentuk-bentuk totaliterianisme pada Negara Jerman, Italia dan Jepang dianggap sebagai penjahat perang. Pengaruh Liberalis-Kapitalis dan Sosialis-Komunis masuk dalam rongga Negara-negara fasisme, sehingga Jerman dibelah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur; Italia dipengaruhi oleh paham komunis serta Jepang menjadi sebuah Negara monarki-konstitusional. Tetapi Liberalis-Kapitalis dapat mampu mengalahkan sebuah Negara hanya dengan dua kata “Keterbukaan dan Kebebasan” (Contoh kasus: Uni Soviet 1991 dan Revolusi Perancis 1799). Sedangkan sosialis-komunis membutuhkan waktu yang lama guna mempengaruh sebuah bangsa atau Negara, diperlukan energi untuk melakukan agitasi dan propaganda disertai oleh keinginan terwujudnya masyarakat tanpa kelas, diperlukannya pendidikan, pembentukan sosial-budaya, perekonomian dan lain-lain—oleh karenanya hanya sedikit Negara di dunia yang menganut paham tersebut; bahkan Tiongkok hari ini lebih cenderung kearah sosialis-kapitalis, sedangkan komunisme hanya sebatas simbol sejarah peradaban Tiongkok, tanpa menegasikan paham Maoisme.

Pasca perang dunia II, ideologi yang masih menjadi pemahaman dari mayoritas masyarakat dunia hari adalah; Liberalis-Kapitalis yang terejawantah pada sebuah sistem pemerintahan demokrasi parlementer, presidensial, monarki-konstitusional dan Sosialis-Komunis tercermin pada sistem pemerintah terpimpin, tersentralisasi, terisolasi dan menahan segala bentuk paham-paham liberal guna mempertahankan eksistensi Negara berdasarkan ideologi yang dianut. Feodalisme dan Fasisme telah tinggal cerita sejarah, pengaruhnya hanya terbatas pada kekuatan militer dan pemahaman ideologis semu. Kemudian perang dingin menghasilkan dua kutub dunia; blok barat dan blok timur—motifnya adalah pertahanan kekuasaan, sumber daya alam dan ekonomi-politik Negara. Sedangkan dua ideologi yang masih eksis sampai saat ini; mempunyai motif politik yang mencakup seluruh elemen masyarakat.

Pasca perang dunia, terjadi pergolakan ideologi di beberapa Negara; tidak terkecuali disangkutpautkan dengan Islam sebagai ideologi alternatif atas kejumudan konflik politik antara Liberalisme dan Komunisme. Namun usai berakhirnya perang dingin, yang kemudian ditandai dengan peristiwa terpecahnya Uni Soviet pada tahun 1991, yang mana hal tersebut berdampak pada munculnya “pemenang” yaitu blok barat di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, yang membuat masyarakat internasional tidak lagi dihantui kecemasan akan terjadinya perang besar seperti perang dunia pertama ataupun perang dunia kedua (Kusuma, Rahmawati, & Fathun, 2022). Sehingga usai perang dingin pun, masih terdapat beberapa pergolakan ideologis atas liberalis-kapitalis, sosialis-komunis, nasionalisme dan Islam. Islam mulai dikomodifikasikan menjadi sebuah ideologi dengan harapan akan mampu bersifat fleksibel dan inklusif terhadap proses amalgamasi dengan ketiga ideologi yang mendunia; sehingga konsepsi tersebut dapat dibedakan sebagaimana disebutkan dalam Islam antara Haq dan Bathil; antara Manfaat dan Mudharatnya. Allah berfiman dalam Surah Al - Hujjurat ayat 13;

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa”* (Q.S. 49:13).

Ir. Soekarno mengungkapkan hal yang demikian serupa dalam konteks Indonesia menjadi tempat bermuara tiga ideologi besar di dunia, yaitu Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme—ketiganya seringkali bersitegang dengan orientasi hegemoni ideologi politik guna mencapai suatu kekuasaan. Perseteruan antar ideologi biasa disebut sebagai pergolakan ideologi. Bahwa kebanggaan Indonesia terletak pada kekuatan Asia yang tentunya produk ideologinya adalah Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme. Adapun Ir. Soekarno menegaskan bahwa Islam yang sejati tidaklah mengandung asas anti-nasionalis; Islam uamh sejati tidaklah bertabiat anti-sosialistis. Selama kaum Islamis memusuhi paham-paham nasionalisme yang luas budi dan Marxisme yang benar, selama itu kaum Islamis tidak berdiri diatas *Shirotol Mustaqim* (Sukarno, 2005).

Dampak Perang Dunia II terhadap pergolakan ideologi sangat signifikan dalam membangun tata kelola Negara-negara dunia ketiga. Beberapa Negara di Eropa Timur yang dinilai dekat dengan peradaban barat pun masih dianggap belum mampu mengelola Negara yang baik dengan menggunakan sistem pasar bebas. Sehingga politik ideologis kerap disandingkan dengan pandangan-pandangan populis yang dikaitkan dengan kemanusiaan, kebebasan, kesetaraan gender dan pemahaman keagamaan.

# Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis dan kualitatif deskriptif. Dengan harapan tulisan ini dapat menjelaskan secara deskriptif-analisis didukung dengan kajian pustaka yang diperoleh serta penjelasan secara empiris dan teoritis (Darmalaksana, 2020). Adapun teori yang digunakan pada tulisan ini adalah teori ruang publik (*Public Sphere*) yang dikemukan oleh Jurgen Habermas, teori Elit yang dikemukan oleh Gaetano Mosca dan Vilfredo Pareto dan teori Oligarki yang dipopulerkan oleh Jeffrey Winters..

Paradigma-paradigma tersebut diambil sebagai argumentasi ilmiah dari pemahaman ideologis dapat memicu sebuah perkembangan zaman dan proses industrialisasi 4.0 dalam sudut pandang teknologi, informasi dan komunikasi sebagai bagian daripada objek penelitian ekonomi-politik di Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok dan Indonesia.

# Hasil dan Bahasan

## Hasil

Usai perang dunia II yang mengakibatkan banyaknya korban nyawa karena peristiwa tersebut; namun ada pula elemen yang tidak mati hingga hari ini masih bermukim pada Negara-negara penjajah dan Negara yang terjajah yakni; ideologi. Dibentuknya beberapa partai politik di Negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat dan Indonesia, penerapan sistem mono-parties pada Negara sosialis-komunis seperti Tiongkok dan karakteristik sosialis secara budaya politik dan pengambilan keputusan atas kebijakan geo-politik seperti di Rusia.

Sehingga membentuk sebuah sistem pemerintahan dengan penerjemahannya masing-masing. Demikian juga struktur masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan indikator-indikator tertentu; di Amerika Serikat umumnya masyarakat kelas atas mempunyai akses pemerintahan yang lebih luas, dan jauh lebih produktif ketimbang masyarakat kelas bawah yang memperoleh bantuan dari pemerintah setiap tahunnya. Negara ini sering kali menggunakan isu-isu populis seperti isu diskriminasi ras sebagai gerakan kesadaran sosial, seperti gerakan “*Black Lives Matter*” digunakan untuk membela kaum minoritas warga berkulit hitam.

Sedangkan di Rusia, masyarakat umumnya mempunyai kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Eropa Timur; berbeda dengan Eropa Barat dan Negara-negara lainnya yang telah dipengaruhi oleh pengaruh liberalisme-kapital. Rusia tetap memiliki komitmen bahwa Negara ini tidak hilang entitasnya sebagai masyarakat serumpun yang tergabung dalam CIS (*The Commonwealth of Independent States*) di dalamnya tergabung Negara-negara pecahan Uni Soviet, kecuali Ukraina dan Georgia. Pada Negara seperti Rusia dan Tiongkok, isu-isu populis yang dikaitkan dengan agama, suku dan ras tidak begitu signifikan. Umumnya gerakan populisme oleh kedua Negara tersebut dilakukan secara kelembagaan dan sebagai dasar dalam kebijakan geo-politik internasional (Contoh; Rusia vs Ukraina dan Tiongkok vs Taiwan).

Sementara di Indonesia, populisme berdasarkan suku, ras dan agama masih kian mengental pada hubungan antar masyarakat, hingga menjadi sebuah konflik horizontal yang tidak terhindarkan.

Proses demokratisasi dalam sebuah lini melahirkan sebuah pandangan beranekaragam di tengah masyarakat, populisme kerap disandingkan dengan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi di pelbagai wilayah nusantara. Berbeda dengan Rusia, Amerika Serikat dan Tiongkok yang pembangunannya relatif lebih merata, dikarenakan konektivitas yang kuat serta menjadi bagian dari Negara dunia pertama dan kedua. Dalam teori sistem dunia, dijelaskan bahwa Rusia dan Tiongkok adalah Negara Eksternal yang mempunyai sistem perekonomian tersendiri disesuaikan dengan kehidupan bermasyarakat dan karakteristik budaya yang ada.

Sedangkan Amerika Serikat merupakan Negara bagian inti dan Indonesia juga demikian masuk pada Negara Eksternal yang masih ketergantungan atas Negara lain untuk melakukan pembangunan ekonomi. Hubungan demikian disebut ‘struktural’ karena unsur dominasi dan ketergantungan terjalin bersama dalam suatu sistem yang kompleks, baik di dalam maupun antar sektor. Kemiskinan yang disebabkan oleh hubungan ini bersifat struktural (Chalmers & Hadiz, 1997). Tidak semata-mata akibat faktor domestik, seperti kurangnya pendidikan atau kalori, tetapi karena eksploitasi. Kemiskinan suatu kelompok dalam masyarakat terkait dengan kemakmuran elit dalam masyarakat itu, atau elit masyarakat lain. Selanjutnya, kemakmuran kelompok sosial kecil yang merupakan elit ini bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi juga politik dan budaya. Ketiga faktor tersebut, yaitu politik, ekonomi dan budaya, saling terkait untuk membentuk hubungan dominasi-ketergantungan dalam sistem sosial (Chalmers & Hadiz, 1997).

Demokrasi memberi ruang bagi populisme muncul, sebagai sebuah sistem; demokrasi adalah sistem yang dilahirkan oleh kaum barat pemenang Perang dunia II, keinginan untuk mengejawantahkan kebebasan, kemajemukan dan persaudaraan sesama umat manusia dan penduduk bumi. Populisme terakhir kali hadir di Rusia pada masa Pemerintahan Boris Yeltsin, yang dipahami sebagai diarahkan untuk mengumpulkan dukungan pribadi dengan mengorbankan lembaga politik Rusia yang sudah mapan, termasuk parlemen (Hadiz & Chryssogelos, 2017). Oleh karena itu, dari satu sudut pandang, mobilisasi populis biasanya ditujukan untuk memperluas ruang lingkup partisipasi politik secara permanen sambil menantang pengaturan kelembagaan yang ada.

Akan tetapi, dari sudut pandang lain, terutama dari kaum liberal politik klasik, populisme merupakan ancaman serius terhadap prinsip dan prosedur politik perwakilan dan karenanya terhadap demokrasi itu sendiri (Hadiz & Chryssogelos, 2017).

* 1. **Bahasan**

Perang dunia II melahirkan sebuah sistem demokrasi yang kemudian diadopsi oleh berbagai Negara. Pada era industrialisasi 4.0, populisme masuk pada ruang-ruang digital yang disebut sebagai media sosial; ruang pubilk yang dijelaskan oleh Habermas, ruang publik lebih menekankan adanya ide-ide yang terlembagakan dan mendapatkan klaim secara objektif sehingga bisa diterima oleh publik secara luas; yang jika tidak terealisasikan, minimal ide tersebut melekat secara sadar di benak publik (Nasrullah, 2012).Narasi ideologis di era industrialisasi 4.0 menjelma menjadi sebuah lembaga yang bergerak dalam ruang sosial media; sebagai tanda memasuki era *post-truth* atau dikenal masa pasca-kebenaran. Liberalis-kapitalisme tidak lagi bergerak pada ranah ideologis semata, melainkan juga pada sistem teknologi, informasi dan komunikasi. Munculnya beragam sentimen keagamaan, rasial dan kesukuan di Indonesia terlembaga dalam sebuah media sosial.

Sehingga media sosial di era industrialisasi kental dengan konflik horizontal dalam ruang publik digital, sebagai contoh pada masa-masa Pilkada DKI Jakarta yang menjadi awal politisasi agama dalam ruang media sosial; muncul beragam akun sosial media yang mengecam tindakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas perilakunya yang menistakan agama Islam, sedangkan muncul juga akun sosial media yang beranggapan bahwa perilaku Ahok tidak sepenuhnya salah.Di Amerika Serikat demikian, banyak kelompok masyarakat yang berempati dengan golongan kulit hitam dengan narasi kesetaraan ras dan keadilan sosial menyerang Presiden Donald Trump akibat perkataannya di sosial media Twitter yang menyebutkan bahwa jumlah massa di Washington DC sangat sedikit dan memuji aparat keamanan yang berjaga serta juga Trump menyebutkan bahwa slogan “*Black Lives Matters*” adalah simbol kebencian. Sebagaimana Trump mengungkapkan;

“Simbol itu akan semakin memusuhi kepolisian New York. Kepolisian New York mungkin tidak akan membiarkan simbol kebencian itu digambar di jalan terbesar di New York tersebut” (CNN Indonesia, 2020).

Hal itu yang disebut oleh Habermas, bahwa Trump dan Ahok sebenarnya berasal dari kalangan borjuis itu secara sadar maupun tidak, mewakili dua identitas di dalam dirinya sebagai publik. Diri sebagai pemilik kapital atau pekerja yang dengannya ia harus mewakili suara ruang pribadi tersebut dengan mengaitkannya sebagai kepentingan publik dan juga sebagai warga yang murni dan sederhana.Sebagai bagian dari kelompok Elit yang memerintah, tentunya mempunyai instrumen media dan pendukung atas narasi yang disampaikan pada media sosial. Dalam media sosial, masyarakat dunia maya terbelah menjadi dua kutub yang pro dan kontra terhadap suatu perkataan. Ideologi hilang kemurniannya, karena bergerak dalam produk kapital yang berorientasi untuk memperoleh profit sebesar-besarnya. Algoritma kapitalisasi media sosial membawa Islam dan Komunisme saling dibenturkan satu dengan yang lain—begitupun isu-isu lainnya yang bersifat populis.

Bahwa oligarki mempunyai media sosial, untuk menetapkan struktur masyarakat tetap terbelah menjadi dua yakni; *like and dislike*, bergerak untuk memperjuangkan golongannya dan bersifat pragmatis-realistis; sehingga menegasikan segala bentuk idealisme dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oligarki menjadi senyawa bagi demokrasi, karena adanya kebebasan tidak menjadikan hadirnya sebuah kesetaraan. Trump dan Ahok adalah kelompok elit yang senantiasa bergerak dalam kemajemukan dan kebebasan berpendapat, sehingga dapat diserang dan bisa juga untuk dijatuhkan.Sedangkan kelompok lainnya diatas kedua tokoh politik tersebut, merupakan kelompok yang mempunyai perusahaan media massa, perusahaan tambang dan perusahaan lainnya yang mempunyai pengaruh dalam mengatur sebuah kekuasaan.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Winters, pasca perang dunia II setiap Negara hendaknya membagi-bagi porsi kekuasaannya masing-masing seperti Sumber daya Alam di Negara-negara jajahan serta kerjasama Negara-negara serumpun seperti yang dilakukan Inggris terhadap Australia dan Selandia Baru, Amerika Serikat terhadap Malaysia dan sebagian Negara-negara Arab.Dalam teori dependensi, Negara-negara dunia ketiga umumnya akan senantiasa ketergantungan atas Negara dunia pertama dan industri 4.0 akan selalu bergerak lebih lambat pada Negara-negara bekas jajahan, ketimbang Negara-negara penjajahan.

Secara sosial-politik, hal ini menjadi unsur kesengajaan agar setiap Negara-negara tidak dapat mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri dan dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakatnya.Agama tidak menjadi *kaffah* karena telah dibenturkan oleh kepentingan politik yang kental dengan transaksi jabatan, uang untuk memuaskan hasrat kekuasaan dan memperoleh kekuatan yang lebih besar, sehingga dapat memonopoli kekuasaan dan mengatur lebih banyak orang dibawahnya untuk tunduk dan patuh terhadapnya. Komunisme juga tidak lagi bergerak pada ranah kemasyarakatan dan pendampingan rakyat miskin kota, petani dan buruh—namun hanya sebagai narasi akademis yang ditinjau atas realitas kelas masyarakat.Hal ini terjadi bukan karena tidak mau bergerak, tetapi ruang-ruang menjadikan diri setiap orang bergerak dalam sebuah kerusakan dan kehancuran untuk memperoleh nafkah agar bisa menghidupi keluarganya. Perang dunia II memberi dampak luas bagi kehidupan ekonomi tiap Negara, kota, wilayah dan hingga masuk dalam kekuasaan terkecil yakni keluarga.

Kesenjangan sosial lahir dikarenakan adanya ketimpangan politik secara ekstrem pada sistem dunia yang ada—tidak semua Negara dan Kepala Pemerintahan mampu secara berdaulat lepas dari cengkraman oligarki kuasa yang menentukan sandang, pangan dan papan—setiap orang sulit memperoleh akses pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak—karena pembagian kekuasaan hanya dimiliki dan dikuasai para minoritas yang serakah.

# Kesimpulan

# Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik adalah dampak besar dan mengakar bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Selain itu, penghayatan atas agama dan pemahaman ideologi yang hanya segelitir orang memahaminya menjadi dampak Perang Dunia II yang berdampak pada ketimpangan intelektual bagi masyarakat. Sehingga apapun yang diperoleh pada sosial media menjadi asupan primer dalam kognitif tiap-tiap penggunanya.

# Sedangkan industri media berorientasi pada profit yang sebesar-besarnya, tentunya paradigmanya mempunyai tendensi terhadap kepentingan politik dan ekonomi yang menjadi tujuan besar korporasi. Sedangkan elit politik hanya mengikuti aturan main yang telah dibuat oleh pemilik korporasi sebagai *sponsorship*-nya untuk memperoleh sebuah kuasa. Konflik horizontal hadir juga atas tujuan dari para oligarki, agar struktur masyarakat tidak berubah dan tiap yang miskin tetap akan dihisap dan para borjuis tetap mempertahankan kekayaannya.

Karenanya pertumbuhan ekonomi global akan berjalan seiring dengan pergolakan ideologi politik dan ekonomi global, yang hanya dilaksanakan oleh segelintir orang di dunia, perangkatnya telah disediakan oleh Negara-negara dunia pertama yang memproduksi beragam jenis teknologi, transportasi, hingga makanan dan minuman yang umumnya dikonsumsi oleh Negara lainnya. Liberalis-kapital menguasai makanan, teknologi dan komunikasi, serta pada masa pandemi seperti distribusi obat-obatan atau vaksin yang bergerak di dunia farmasi; Negara dunia ketiga hanya menjadi konsumen dan membeli barang-barang tersebut. Sebagai manusia berpikir, hendaknya mampu memahami posisi bangsa kita saat ini yang ketergantungan terhadap bangsa lain, sehingga kita diharapkan mampu menjadi *civilization creator* atau pencetak peradaban yang sesuai dengan Tujuan mulya untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

# Referensi

Chalmers, I., & Hadiz, V. R. (1997). *The Politics of Economic Development in Indonesia (Contending Perspective).* New York: Routledge Studies in The Growth Economies of Asia.

CNN Indonesia. (2020, July 02). *Trump Sebut Slogan Black Lives Matter Simbol Kebencian*. Retrieved February 10, 2023, from CNN Internasional: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200702101814-134-519914/trump-sebut-slogan-black-lives-matter-simbol-kebencian

Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-6.

Habermas, J. (1989). *The Structural Jurgen Habermas, 1962/1989, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of a Bourgeois Society.* Cambridge: MA: MIT Press.

Hadiz, V. R., & Chryssogelos, A. (2017). Populism in world Politics: A Comparative cross-regional perspective. *International Political Science Review No. 38 Vol. 4*, 399-411.

Harari, Y. N. (2017). *Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Haryanto. (2017). *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar.* Yogyakarta: Penerbit PolGov.

Hasan, K. (2011). ANALISIS: PROPAGANDA FASISME. *PRODI: ILMU KOMUNIKASI FISIP UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 1-9.

Kusuma, A. J., Rahmawati, R., & Fathun, L. O. (2022). Model Islam Inklusif di Indonesia sebagai Kajian Kritik terhadap Teori "Clash of Civilization" Samuel P. Huntington. *Journal of Political Issues*, 62-77.

Mosca, G. (1939). *The Ruling Class.* New York and London: McGraw Hill Book Company, Inc.

Nasrullah, R. (2012). Internet dan Ruang Publik Virtual, Sebuah Refleksi atas Teori Ruang Publik. *Jurnal Komunikator Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 26-33.

Nusferadi, A. (2008). Konteks Internasional Pasca Perang Dunia II dan Langkah Awal Perjuangan Diplomasi RI. *Jurnal Sejarah LONTAR Universitas Negeri Jakarta Vol. 5 No. 1*, 1-14.

Sukarno. (2005). *Di Bawah Bendera Revolusi Cetakan Pertama Jilid V.* Jakarta: Yayasan Bung Karno.

Supratman, F. R. (2022). PEMIKIRAN SUKARNO MENGENAI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) (1950-1965). *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol. 8 No. 2*, 10-19.

Winters, J. (2011). *Oligarki.* New York: American Political Science Assosiation.